

KEBIJAKAN IMIGRASI PRESIDEN TRUMP TERHADAP MASYARAKAT IMIGRAN DI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2018

Made Fitri Maya Padmi, Zaenab Yulianti
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
made.padmi@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Tulisan membahas tentang kebijakan imigrasi Donald Trump pada 2 tahun pertama dan dampaknya terhadap masyarakat imigran di Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah Executive Order di tandatangi Donald Trump pada tahun 2017 terkait larangan akses masuk masyarakat dari tujuh negara muslim yang menurut Amerika Serikat merupakan negara pendukung terorisme. Karya tulis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan serta penyajian data secara eksplanatif. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Donald Trump mengakibatkan dampak terhadap imigran dari tujuh negara muslim yang ada dan calon imigran yang akan menuju ke Amerika Serikat. Selain dampak terhadap sasaran utama, kebijakan ini juga berdampak pada imigran-imigran lain diluar tujuh negara tersebut serta keamanan, tindakan diskriminasi dan fenomena Xenophobia dan Islamophobia di Amerika Serikat.

Kata Kunci: *Donald Trump, Executive Order, Imigran, Diskriminasi*

PENDAHULUAN

Imigrasi merupakan salah satu persoalan yang biasanya dihadapi oleh beberapa negara maju tidak terkecuali Amerika Serikat (selanjutnya akan disebut AS). Terlebih AS dikenal sebagai negara besar dengan perekonomian yang maju, maka banyak masyarakat internasional yang melakukan imigrasi dengan harapan dapat memperbaiki nasib hidupnya di negara tersebut. Oleh karena ini imigrasi menjadi subjek legalisasi bagi para pembuat kebijakan di AS. Dikarenakan perlunya peninjauan untuk mengatur imigran-imigran yang akan atau telah tinggal di AS.

Penyerangan terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington DC pada 2001 menjadi titik balik bagi AS untuk melakukan evolusi kebijakan. Serangkaian evolusi kebijakan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang imigrasi. Upaya AS untuk memerangi

musuh kemudian di implementasikan dengan adanya “*war against terror*”. Dengan pernyataan ini opini publik terhadap terorisme secara tidak langsung identik dengan Islam kemudian menjadi justifikasi bagi berkembangnya “Islamophobia” di kalangan masyarakat barat. Pengumuman tewasnya Osama bin Laden pada sebuah operasi militer AS di Pakistan akan menimbulkan kekhawatiran bahwa AS dan sekutunya akan menghadapi balasan dari pendukung Osama bin Laden dan kelompok-kelompok ekstrimis Islam (Patnistik, 2011).

Sebelum pelantikannya, Trump berulang kali berjanji akan melarang individu muslim memasuki AS sebagai sarana meningkatkan keamanan nasional. Pada 27 Januari 2017, Presiden Donald J. Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pencegahan terorisme yang menghentikan program pengungsi selama 120 hari, melarang pengungsi Suriah tanpa batas waktu dan mengurangi batas penerimaan pengungsi hingga lima puluh ribu termasuk penangguhan dari hampir semua warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya individu kelahiran asing telah dihukum atau terlibat dalam kejahatan terkait terorisme sejak 11 September 2001, termasuk warga negara asing yang memasuki AS setelah menerima visa kunjungan, pelajar, atau pekerjaan, atau yang masuk melalui program pemukiman kembali pengungsi AS. Memburuknya kondisi di negara-negara tertentu karena perang, perselisihan, bencana dan kerusuhan sipil meningkatkan kemungkinan bahwa teroris akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memasuki AS (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017).

Dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017-2018. Karya tulis ini juga akan menyinggung mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penerbitan kebijakan imigrasi yang dianggap diskriminatif terhadap masyarakat imigran yang akan memasuki Amerika Serikat dan juga yang telah berda di dalam negara ini.

PEMBAHASAN**Dasar Hukum Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat**

Amandemen Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan tahun 1965 menghapuskan sistem kuota asal-usul nasional dan membentuk sistem preferensi kategoris. Sistem baru ini memberikan preferensi untuk kerabat warga negara AS dan penduduk tetap yang sah secara hukum dan untuk imigran dengan keterampilan kerja yang dianggap berguna bagi AS. Tujuan dari kebijakan ini adalah : (a) Untuk menyatukan kembali keluarga dengan mengakui imigran yang siap memiliki anggota keluarga yang tinggal di AS; (b) Untuk menerima pekerja dalam pekerjaan dengan permintaan kuat akan tenaga kerja; (c) Untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi risiko penganiayaan politik, rasial, atau agama di negara asal mereka; dan (d) Untuk memberikan izin masuk kepada orang-orang dari beragam negara (Congress Of The United States, 2006).

Pada tahun 2003 AS membentuk sebuah departemen baru yaitu *Homeland Security* (DHS) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas layanan imigrasi, penegakan perbatasan dan inspeksi perbatasan. Departemen ini fokus pada penegakan hukum imigrasi AS yang cerdas dan efektif untuk merampingkan dan memfasilitasi proses imigrasi legal (Congress Of The United States, 2006) DHS membagi layanan imigrasi untuk membagi fungsi penegakan hukum yang ditangani oleh lembaga *Immigration and Customs Enforcement* (ICE) atau Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai dari fungsi naturalisasi dan visa. Pemerintahan George W. Bush menjadikan keamanan perbatasan sebagai prioritas utama, memperkuat penyaringan dan langkah-langkah keamanan di bandara, memungkinkan petugas bandara untuk lebih mudah menahan dan mendeportasi imigran yang diduga memiliki hubungan dengan terorisme dan melembagakan prosedur aplikasi visa yang lebih ketat (The Council on Foreign Relations, 2018).

Terpilihnya Barack Obama sesungguhnya sebuah sejarah besar yang terjadi dalam perjalanan bangsa Amerika Serikat. AS berhasil memilih seorang non kulit putih menjadi presidennya. Masa Jabatan Pertama Ketika Barack Obama terpilih pada 2008 ia mulai membentuk kebijakan imigrasi yang ia bagi menjadi beberapa

kategori yang ditentukan dalam *Blueprint* untuk reformasi imigrasi: mengamankan perbatasan, pertanggungjawaban untuk bisnis yang melanggar hukum dengan melemahkan pekerja AS juga sebagai mengeksploitasi pekerja tidak berdokumen, memperkuat daya saing ekonomi dengan menciptakan sistem imigrasi legal yang mencerminkan nilai-nilai asli AS dan mengambil tanggung jawab untuk orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal (Discover the Networks: A Guide to the Political Left, 2014).

Pada tahun 2012, Presiden Amerika Serikat Barack Obama membela deportasi untuk pemuda. Di bawah perintah Presiden Obama, DHS mulai menunda deportasi dan memberikan visa kerja (selama dua tahun) kepada imigran tidak berdokumen yang dibawa ke AS sebagai anak-anak. Lebih dari satu juta "kedatangan anak-anak" diperkirakan memenuhi syarat untuk apa yang disebut program tindakan yang ditunda atau *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA). Program ini memiliki syarat seseorang harus memiliki catatan kriminal yang bersih, tinggal di menengah, atau veteran militer (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2018).

Kebijakan Imigrasi Presiden Donald Trump

Sejak masa kampanye pemilihan umum di tahun 2016, kelompok ekstrim putih yang dikenal dengan "*White Supremacist*" semakin menunjukkan eksistensinya sebagai pendukung Donald Trump. Jika di masa lalu kelompok ini kerap kali menjatuhkan imigran dan kelompok minoritas lainnya sebagai perilaku kriminal, kini mereka seolah mendapat justifikasi dari sistem pemerintahan Presiden Trump. Artinya tindakan rasisme kulit putih dan kekerasan yang mereka lakukan itu seolah sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan AS saat ini (Permana, 2017). Beberapa kebijakan dalam beberapa hari pemerintahan Donald Trump telah memperlihatkan fenomena anti kulit berwarna. Dari kebijakan melarang orang Islam dengan *Executive Order*, hingga kepada kebijakan imigrasi untuk mendeportasi warga yang tidak bersurat.

Pada minggu pertama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menandatangani tiga *Executive Order*. *Executive Order* ini dinilai sangat kontroversial karena dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat

AS. *Executive Order* yang sangat berpengaruh terhadap imigran di AS adalah sebagai berikut : (a) Tanggal 25 Januari 2017, *Executive Order* tentang "Enhancing Public Safety in the Interior of the United States" yaitu perintah untuk meningkatkan keamanan publik di interior Amerika Serikat (Trump, Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, 2017); (b) Tanggal 25 Januari 2017, *Executive Order* tentang "Border Security and Immigration Enforcement Improvements" yaitu perintah untuk keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi (Trump, Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements, 2017); (c) Tanggal 27 Januari 2017, *Executive Order* tentang "Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States" yaitu perintah untuk melindungi bangsa dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat, selanjutnya disebut "Larangan tujuh negara" (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017).

Executive Order I terkait perintah untuk meningkatkan keamanan publik di interior Amerika Serikat. *Executive Order* ini bertujuan untuk Penegakan hukum imigrasi sangat penting bagi keamanan nasional dan keselamatan publik AS. Banyak alien yang secara ilegal memasuki AS dan mereka yang tinggal terlalu lama atau melanggar ketentuan visa mereka menghadirkan ancaman signifikan terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik. Ini khususnya berlaku bagi orang asing yang terlibat dalam tindak pidana di AS. Dalam perintah eksekutif yang jelaskan dalam laman *White House* ini menilai puluhan ribu alien yang bisa dipindahkan atau dideportasi telah dilepaskan ke komunitas di seluruh negeri, semata-mata karena negara asal mereka menolak untuk menerima repatriasi mereka. Banyak dari alien ini adalah penjahat yang telah menjalani hukuman di penjara Federal, Negara Bagian, dan lokal di AS. Kehadiran orang-orang seperti itu di AS dan praktik negara-negara asing yang menolak pemulangan warga negara mereka, bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

Executive Order II terkait perintah untuk keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi di Amerik Serikat. *Executive Order* ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan imigrasi ilegal di perbatasan selatan dengan

Meksiko. AS menilai organisasi kriminal transnasional mengoperasikan jaringan perdagangan narkoba dan manusia dengan operasi penyelundupan di kedua sisi perbatasan selatan AS dengan Meksiko, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam kejahatan kekerasan dan kematian Amerika Serikat dari obat-obatan berbahaya. Pemerintah eksekutif ini mengutamakan keinginan Donald Trump untuk mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat melalui pembangunan langsung tembok fisik di perbatasan selatan untuk mencegah imigrasi ilegal, perdagangan narkoba dan manusia, dan tindakan terorisme.

Pada 27 Januari 2017, Presiden Donald J. Trump menandatangani *Executive Order III* tentang melindungi bangsa dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat. Pemerintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi warganya dari serangan teroris, termasuk yang dilakukan oleh warga negara asing. Pencegahan terorisme dengan pembatasan akses masuk dari hampir semua warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017).

Analisis Dampak Kebijakan Imigrasi Donald Trump

Dampak yang terjadi akibat kebijakan imigrasi Trump yang ditandatangani pada 27 Januari 2017 tentang pencegahan terorisme melibatkan kelompok-kelompok sasaran yaitu imigran dari tujuh negara yang ada di AS yaitu, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman dan calon imigran dari tujuh negara tersebut yang dibatasi akses masuknya ke AS. Kebijakan-kebijakan imigrasi AS juga mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan imigrasi Trump tidak hanya berdampak pada imigran dari tujuh negara yang dibatasi akses masuknya ke AS. Namun, kebijakan ini mungkin mempunyai dampak pada kelompok-kelompok lain seperti, imigran dari negara-negara lain diluar tujuh negara sasaran yang ada di AS dan kecaman dari negara-negara lain.

Pada tahun 2000 sebelum terjadinya penyerangan 11 September 2001 jumlah imigran yang memperoleh status penduduk permanen di AS belum mencapai satu juta orang. Pada tahun 2001 terjadinya penyerangan jumlah imigran tersebut bertambah sebanyak 217.900 orang dan tahun 2002 bertambah 454 orang.

Setelah pembentukan DHS yang didirikan oleh Presiden George Walker Bush tahun 2002, jumlah imigran permanen yang diterima AS tahun 2003 menurut menjadi 703.542 orang (U.S Department Of Homeland Security, 2019). Pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009 hingga 2016, AS telah menerima sebanyak 8.508.703 orang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 56.338 orang. Hal ini diduga akibat dari retorika kampanye Donald Trump yang dikhawatirkan menjadi ancaman sosial bagi masyarakat imigran, warga muslim dan kaum minoritas hispanik yang akan mendapatkan tindakan rasisme dan diskriminasi dari pendukung Trump (Suastha, 2016).

Tabel 1

Country of Birth	2016	2017	2018
Iran	13.298	13.791	10,116
Iraq	18.904	14.203	14,351
Libya	642	780	499
Somalia	6.958	7.404	7,557
Sudan	3.159	3.515	3,658
Syria	4.800	5.877	14,686
Yemen	13.040	6.029	1,885

Tabel 1. Jumlah Penduduk yang mendapatkan *Green Card* berdasarkan Negara Kelahiran Tahun Fiskal 2016-2018

(Sumber: <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2018>)

Pengaruh *Executive Order* Trump tentang "Larangan tujuh negara" yaitu negara Irak, Iran, Yaman, Somalia, Suriah, Sudan dan Lybia. Irak mengalami penurunan sebanyak 4.702 orang yang memperoleh *Green Card* sejak tahun 2016 hingga 2017 dan di tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 148 orang. Yaman mengalami penurunan sebanyak 7.011 orang yang memperoleh *Green Card* sejak tahun 2016 hingga 2017 dan turun drastis ditahun 2018 menjadi hanya 1885 orang yang diterima. Penduduk Iran dan Libya mengalami fluktuasi dimana di tahun 2017 sempat mengalami peningkatan namun di tahun 2018 jumlah tersebut berkurang banyak. Jumlah orang yang memperoleh *Green Card* berdasarkan negara tempat lahir dari Somalia, Syria/Suriah, dan Sudan justru mengalami peningkatan sejak 2016 hingga 2018.

Dari tahun 2016 sebelum dikeluarkannya kebijakan ini hingga tahun 2018 hanya negara Yaman yang mengalami penurunan angka paling drastis. Penerima *Green Card* berdasarkan tempat lahir untuk negara Yaman mengalami penurunan lebih dari 80%. Hal ini dinilai karena Yaman belum dapat bekerja sama sepenuhnya dengan Amerika Serikat dalam upaya kontraterorisme (U.S Department Of Homeland Security, 2019).

Kedatangan pengungsi dari tujuh negara ke AS mengalami penurunan karena Presiden Trump memerintahkan untuk membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke AS. Dari tahun 2016 hingga 2017 jumlah penurunan pengungsi yang datang dari 7 negara ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari tahun 2016 ke 2018 penerimaan pengungsi dari Iran menurun hingga 98% dari angka 3750 menjadi hanya 41 orang. Penerimaan pengungsi tahun fiskal 2016-2018 dari Irak mengalami penurunan 98%, Somalia mengalami penurunan hingga 97%, Sudan menurun hingga 94%, Yaman menurun 100% (angka penerimaan di 2016 sebanyak 26 orang pengungsi). Pengungsi asal Syria yang paling mendapatkan dampak yang paling buruk. Penerimaan di tahun fiskal 2016 mencapai 12.587 orang, tahun 2017 menurun menjadi 6557 orang, dan di tahun 2018 Amerika Serikat hanya menerima sebanyak 62 orang pengungsi. Penurunan yang dialami tahun 2018 mencapai 99% dibandingkan dari tahun 2016. Syria mengalami perang berkepanjangan dimana Amerika Serikat ikut dalam perang tersebut, namun penerimaan pengungsi justru diperkecil sejak Presiden Trump menjabat.

Tabel 2

Country of Nationality	2016	2017	2018
Iran	3.750	2.577	41
Iraq	9.880	6.886	140
Somalia	9.020	6.130	257
Sudan	1.458	980	76
Syria	12.587	6.557	62
Yemen	26	21	0

Tabel 2. Kedatangan Pengungsi Tahun Fiskal 2016-2018

(Sumber: <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2018>)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, negaranya tidak akan menjadi tempat penampungan bagi migran ilegal dan pengungsi. Hal ini sangat

disayangkan mengingat Amerika Serikat merupakan negara destinasi dan penerima terbesar bagi pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara di dunia. Semenjak pemerintahan Presiden Trump hal ini semakin berkurang drastis dikarenakan kebijakan pemerintah yang mengurangi platform penerimaan pengungsi hingga lebih dari 50% setiap tahunnya (U.S. Department of Homeland Security, 2020).

Kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS) dibawah pemerintahan Donald Trump tidak hanya berdampak pada tujuh negara saja. Namun ternyata turut berdampak bagi warga negara lain seperti warga Meksiko, Colombia, Venezuela dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Dibawah kebijakan baru AS tentang keimigrasian, mereka yang terlibat pelanggaran imigrasi akan ditindak layaknya penjahat. Mereka tidak lagi dikenai hukuman administratif, tapi hukum pidana. Menurutnya banyak negara bagian yang menolak kebijakan ini. Setidaknya ada 12 negara bagian yang menolak termasuk New York dan Washington DC, di mana negara-negara bagian ini memang memiliki kebijakan melindungi imigran, termasuk imigran gelap (Mulana, 2018).

Diskriminasi Sosial di Amerika Serikat terhadap Masyarakat Migran

Masyarakat Muslim A.S. secara jelas mengungkapkan keprihatinan dan kekhawatiran tentang masa depan negara dan tempat mereka dalam masyarakat Amerika setelah pemilihan Donald Trump sebagai presiden. Sebagian besar Muslim tidak puas dengan arah negara ini, yang merupakan pembalikan pendapat dari 2011. Mayoritas Muslim AS melihat Partai Republik dan Trump tidak ramah terhadap Muslim Amerika. Dan sebagian besar Muslim mengatakan diskriminasi anti-Muslim lazim di masyarakat Amerika. Kekhawatiran dan kekhawatiran ini paling menonjol di kalangan wanita Muslim dan di antara mereka yang lahir di Amerika Serikat (Pew Research Center, 2017).

Menurut *Khaled A. Beydoun* merupakan profesor ilmu hukum dan penulis buku “*American Islamophobia: Understanding the Roots and Rise of Fear*”, walaupun Donald Trump belum membangun dinding batas dengan Meksiko, peraturan perbatasan AS jauh lebih ketat diterapkan dari[ada sebelumnya. Kebijakan baru ini berubah menjadi tindakan nyata penyaringan demografis berdasarkan ras, kebangsaan, dan agama menjadi kriteria yang paling menonjol

bagi penolakan maupun penerimaan. Meskipun diskriminasi tidak terlihat secara nyata, motif Trump untuk menghapuskan standar imigrasi sangat indetik dengan permusuhan dan rasisme. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menenangkan basis xenofobik pendukung Trump yang percaya bahwa kaum berkulit hitam dan coklat merupakan “orang asing yang telah mengambil pekerjaan kami.” Ketakutan yang salah dan rasis tersebut, yang dengan senang hati justru berusaha dipuaskan dan dilayani oleh administrasi Trump, dalam prosesnya sangat merusak kemampuan AS untuk menarik pekerja paling terampil dan berbakat dari seluruh dunia (Beydoun, 2018).

Pada 18 April 2017, Presiden Trump kembali mengeluarkan *Executive Order* “Beli Produk AS dan Pekerjaan Orang AS” menyatakan bahwa: “Untuk menciptakan upah dan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi bagi para pekerja di AS, serta untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka, hal itu akan menjadi kebijakan dari lembaga eksekutif untuk menegakkan dan mengelola secara ketat undang-undang yang mengatur migrasi masuk ke AS bagi para pekerja dari luar negeri” (Trump, President Trump Promotes “Buy American and Hire American”, 2018). Korelasi yang ditarik oleh kebijakan tersebut mengadopsi pandangan bahwa orang Amerika kulit putih akan kehilangan pekerjaan mereka karena direbut oleh orang asing. Oleh karena itu, reformasi drastis dalam kebijakan imigrasi AS diperlukan untuk melindungi kepentingan warga Amerika kulit putih dalam bidang ekonomi. Hal ini tentu akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat imigran dimana masyarakat imigran akan dipandang sebagai ancaman kesejahteraan dan ekonomi bagi warga Amerika kulit putih.

Sementara itu, Larangan Muslim yang memecah-belah keluarga di perbatasan dan mempercepat deportasi telah membalikkan komitmen untuk menyerap “kerumunan pencari kebebasan,” *executive order* Presiden Trump juga akan mencegah perusahaan AS dalam memikat kedatangan orang-orang yang paling berbakat dan inovatif dari seluruh dunia (Beydoun, 2018).

Dalam kondisi ini, AS akan kehilangan inovasi, semangat kewirausahaan dan keterampilan yang dibawa para pekerja asing. Terutama mereka yang berasal dari masyarakat kelas pekerja kulit putih yang menuntut kebijakan xenofobik, yang

tidak cukup berpendidikan atau cukup terampil untuk mengisi pekerjaan tersebut. Namun, realitas pasar lebih penting dari pada retorika Trump yang meraih popularitas berkat eksploitasi isu xenofobik dan supremasi kulit putih di AS saat ini, dan stereotip yang mengalahkan pembuatan kebijakan eksekutif di era Trump (Beydoun, 2018).

Rasisme masih merupakan masalah yang sangat mendesak di AS saat ini. Kadang-kadang itu terang-terangan dan terbuka, tetapi seringkali bisa lebih halus, atau bahkan dibangun ke dalam sistem, seperti yang terlihat oleh profil rasial oleh petugas penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya. Nasionalisme kulit putih, islamofobia dan *xenophobia* adalah ciri khas kampanye presiden Trump sangat efektif. Keberhasilan kampanye memastikan bahwa ketakutan putih memicu akan tetap menjadi komponen inti dari administrasi Trump. Kebijakan Trump telah mencabut hak, perlindungan, dan peluang dari orang kulit berwarna (Maxwell, 2019).

Dalam artikel Amerika Serikat dan Islamofobia, Prof Dr Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menjelaskan, Islamofobia tak hanya bertahan, tapi cenderung meningkat di Amerika Serikat sejak awal millennium baru yang terus berlanjut, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Bisa diduga peningkatan Islamofobia itu membuat kaum Muslim Amerika menjadi sasaran diskriminasi yang terus meningkat (Azra, 2019).

Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) Washington D.C. dalam survei berjudul *American Muslim Poll 2018: Pride and Prajudice-Featuring the First-Ever National American Islamophobia Index*, menemukan peningkatan Islamofobia di kalangan warga AS. Dalam skala 0-100, indeks Islamofobia mencapai 17 skor yang cukup tinggi dibandingkan sikap anti terhadap kelompok agama-agama lain. Memang masih ada komunitas lain yang juga mengalami fobia semacam umat Yahudi, tetapi persentase tingkat Judeofobia jauh lebih rendah dibandingkan Islamofobia. Relatif tingginya Islamofobia terkait erat dengan kalangan warga Amerika yang mendukung persepsi stereotipikal yang berkembang di kalangan masyarakat: bahwa Muslim gemar mempraktikkan kekerasan atau misogini; bahwa Muslim agresif terhadap negara AS; bahwa muslim

memperlihatkan gejala dehumanisasi atau bahwa kaum Muslimin secara keseluruhan bertanggung jawab atas kekerasan individu Muslim (Azra, 2019).

Semua persepsi stereotipikal ini selanjutnya menjadi dasar bagi tindakan atau kebijakan diskriminatif terhadap kaum Muslim dan Muslimah. Menurut survei ISPU, 61 persen Muslim/Muslimah mengakui merasakan dan pernah mengalami diskriminasi dari kelompok warga Amerika lain atau petugas/pejabat pemerintah. Lazimnya yang menjadi sasaran diskriminasi adalah Muslimah keturunan Arab, dan anak muda Muslim. Fenomena diskriminasi yang dihadapi kaum Muslim AS memperpanjang ‘tradisi diskriminasi’ dalam sejarah Amerika walau juga terjadi perubahan. Pada masa silam yang belum terlalu lama, diskriminasi terutama dialami orang-orang atau komunitas hitam. Meski keadaannya lebih baik, warga kulit hitam masih merasakan berbagai bentuk diskriminasi (Azra, 2019).

Dalam perkembangan selanjutnya, komunitas Hispanik atau Latino menjadi korban diskriminasi. Dan pada masa lebih kontemporer subjek diskriminasi bertambah, yaitu kaum Muslim. Diskriminasi terhadap kaum Muslim Amerika meningkat berbarengan dengan tumbuhnya Islamofobia di banyak kalangan mayoritas Protestan pasca- peristiwa 11 September (9/11/2001) serangan terhadap World Trade Center di New York City dan markas Pentagon di kawasan Washington DC. Fenomena Islamofobia jelas kian meningkat sejak masa pemerintahan Trump. Sejak masa kampanye sebelumnya, Trump telah menunjukkan sikap anti-Islam dan anti-Muslim; termasuk larangan masuk Amerika bagi tujuh negara Muslim.

Namun, sikap Islamofobia dan anti-Muslim Trump mendapat perlawanan dari kalangan warga Amerika Serikat lain (non-Muslim); mereka melakukan aksi di sejumlah bandara di AS menentang ‘*executive order*’ Trump yang melarang masuknya pendatang dari tujuh negara penduduk mayoritas Muslim. Dengan begitu, kaum Muslimin tidak sendiri dalam menghadapi Islamofobia. Oleh karena itu pula, mereka tidak merasa gentar dan goyah menghadapi Islamofobia dan sikap anti-Islam.

ISPU, 91 persen Muslim merasa bangga dan bahagia dengan keimanan-keislaman mereka (Institute for Social Policy and Understanding, 2018). Dan pada

saat yang sama, mereka juga menilai tinggi identitas Amerika. Terkait dengan itu, mayoritas Muslim Amerika meyakini bahwa keislaman mereka adalah aset bukan liabilitas dalam kehidupan mereka di AS. Sekali lagi Islam bagi mereka adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan psikologis. Perkembangan terakhir kaum Muslimin Amerika memperlihatkan, banyaknya tantangan yang mereka hadapi, terutama terkait dengan sikap anti-Islam dan Muslim di bagian kalangan warga AS. Tetapi juga jelas berbagai tantangan itu tidak melunturkan identitas keimanan dan keislaman. Ini memberikan harapan bagi perkembangan Islam lebih lanjut di negara AS (Azra, 2019).

Reaksi Domestik dan Internasional

Dilansir dari laman VOA Indonesia, ribuan demonstran hari Minggu 29 Januari 2017 berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC, dan juga di berbagai kota di seluruh Amerika menentang larangan masuk bagi warga dari tujuh negara mayoritas berpenduduk Muslim yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak hari Jumat 27 Januari 2017 (Mazrieva, 2017). Dengan meneriakkan kalimat “No hate, no fear, refugees are welcome here”, para demonstran mengecam perintah eksekutif Trump yang memblokir masuknya seluruh pengunjung ke Amerika, setidaknya hingga 120 hari mendatang. Perintah itu juga melarang masuknya pemegang visa dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman selama 90 hari dan melarang masuknya warga Suriah untuk batas waktu yang belum ditentukan.

Demonstrasi juga berlangsung di Battery Park New York yang menghadap ke Patung Liberty yang merupakan ikon Amerika Serikat yang telah mengilhami dan menyambut kedatangan imigran dari seluruh dunia selama lebih dari 140 tahun. Demonstrasi serupa juga terjadi di Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville dan Detroit. Dalam demonstrasi di Battery Park New York, pemimpin minoritas faksi Demokrat di Senat Chuck Schumer mengatakan ia telah mendesak Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri John Kelly untuk mengambil tindakan dalam sengketa itu. “Saya telah mengatakan kepadanya bahwa ia punya kewajiban moral untuk menemui presiden dan mengatakan kepadanya untuk mencabut perintah ini”, ujar Schumer kepada demonstran. Perintah Trump

“membuat kita tidak manusiawi, tidak aman dan tidak seperti warga Amerika” (Mazrieva, 2017).

Empat negara bagian AS mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump mengenai pelarangan warga tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS. Keempat negara bagian itu adalah Massachusetts, New York, Virginia dan Washington. Mereka serempak menggugat perintah eksekutif Trump berisi larangan warga tujuh negara muslim masuk ke AS yang disebut Gedung Putih sebagai langkah penting dalam meningkatkan keamanan nasional (Saputri, 2017).

Reaksi internasional atas *executive order* Presiden Donald Trump melarang masuknya pengungsi dan warga negara dari tujuh negara mayoritas Muslim telah mulai. Para pemimpin dunia menyatakan bahwa pelarangan imigrasi dan juga pengungsi dari 7 negara mayoritas Muslim adalah tindakan yang memecah belah, ilegal, menghina, dan mendiskriminasi. Kecaman secara terbuka datang dari pemimpin negara-negara yang termasuk dalam larangan berpergian tersebut seperti Iran, Irak, Sudan, dan Yaman. Selain negara tersebut, negara-negara di Eropa yang selama ini menjadi aliansi AS, juga ikut mengecam hal tersebut. Perdana Menteri Inggris, Menteri Luar Negeri Perancis, Kanselir Jerman, adalah beberapa diantara pemimpin negara yang mengecam kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump (CNN, 2017).

Kecaman terhadap kebijakan imigrasi juga mendapat respon dari pemerintah Meksiko, untuk mewujudkan salah satu janji kampanye Trump berencana membangun tembok perbatasan negaranya dengan Meksiko, hal ini terus menuai kontroversi dan reaksi penolakan. Pemerintah Meksiko secara terbuka menolak rencana tersebut yang bertujuan mengenakan pajak 20 persen atas barang impor yang akan masuk ke AS (Pos Kota News, 2017).

Dalam sebuah forum hak asasi manusia PBB di Jenewa, Swiss pada Kamis 2 Maret 2018 waktu setempat, Meksiko mengatakan akan mempertahankan hak-hak migran dari langkah-langkah keamanan yang diskriminatif (Purnama, 2017). Meksiko marah pada kebijakan Trump yang melarang perusahaan AS untuk berinvestasi ke perbatasan selatan. Selain itu juga penghinaan kepada imigran, dan

ancaman untuk membuat Meksiko harus membiayai dinding perbatasan yang diusulkan Trump. Dalam pidatonya dia menyebutkan langkah-langkah keamanan yang menargetkan satu bagian dari populasi atau mengkriminalisasi kelompok tertentu melanggar aturan hukum dan sangat diskriminatif. Meksiko meyakini bahwa dengan adanya dinding perbatasan dapat membawa ekstremisme dan intoleransi.

KESIMPULAN

Sejak dikeluarkannya kebijakan imigrasi Donald Trump pada awal tahun 2017, terjadi penurunan yang cukup besar terhadap jumlah imigran yang diterima tinggal secara permanen yang sah secara hukum (mendapatkan *Green Card*) di AS. Tujuh negara terkait kebijakan ini pun terkena dampak yang nyata dalam beberapa data populasi statistik yang dilaporkan DHS. Selain tujuh negara yang menjadi sasaran kebijakan imigrasi AS terkait terorisme, beberapa negara lain seperti Meksiko, China, Guatemala, El Salvador dan lainnya juga mengalami dampak yang signifikan terkait jumlah penerimaan *Green Card* dan pengembalian ke negara asal atau deportasi oleh Amerika Serikat karena peningkatan keamanan dalam negeri AS.

Diskriminasi rasial terhadap masyarakat imigran meningkat selama dua tahun kepemimpinan Presiden Donald Trump. Setimen terhadap warga asing (bukan kulit putih) seperti *xenophobia* dan *islamophobia* meningkat drastis. Hal ini kemudian mengundang berbagai reaksi dari masyarakat Amerika Serikat sendiri secara domestik dan juga dari kalangan pemimpin dunia. Kecaman yang ditujukan kepada kebijakan imigrasi Presiden Trump adalah tindakan yang melanggar HAM dan juga diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. C., Nugroho, A. Y., & Kusuma, A. J. (2018). Relation Between Neoliberalism and the Rise of Right Wing Populism in United States After Donald Trump Victory. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3409-3413.

- Ali, I. S. (2017, March 9). *Amerika: Bangsa Imigran*. Diambil kembali dari [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/03/09/omj8az396-amerika-bangsa-imigran](https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/03/09/omj8az396-amerika-bangsa-imigran)
- Azra, A. (2019, March 14). *Amerika Serikat dan Islamofobia*. Diambil kembali dari UIN Syarif Hidayatullah: <https://www.uinjkt.ac.id/id/amerika-serikat-dan-islamofobia/>
- Beydoun, K. A. (2018, Augustus 06). *Opini: Dampak Xenofobia Amerika di Bawah Pemerintahan Donald Trump*. Diambil kembali dari [Matapolitik.com: https://www.matamatapolitik.com/opini-dampak-xenofobia-di-amerika-di-bawah-pemerintahan-donald-trump/](https://www.matamatapolitik.com/opini-dampak-xenofobia-di-amerika-di-bawah-pemerintahan-donald-trump/)
- Capua, J. D. (2016, October 21). *Kampanye Trump Dinilai Tingkatkan Kebencian Ras dan Agama*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/kampanye-trump-dinilai-rasis-/3560472.html>
- CNN. (2017, January 31). *CNN Politics*. Diambil kembali dari CNN: <https://edition.cnn.com/2017/01/30/politics/trump-travel-ban-world-reaction/index.html>
- Congress Of The United States. (2006, February). *Immigration Policy in the United States*. Diambil kembali dari <https://www.cbo.gov/sites/default/files/109th-congress-2005-2006/reports/02-28-immigration.pdf>
- Discover the Networks: A Guide to the Political Left. (2014, December 23). *Obama's Voting Record and Policy Positions Prior To His Election As President: Immigration*. Diambil kembali dari Discover the Networks.org: <http://archive.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1526>
- Dunn, W. N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Global Detroit and Michigan Economic Center. (2017). *Michigan: We Are All Migrants Here*. Michigan: Global Detroit joined; Michigan Economic Center. Diambil kembali dari http://www.globaldetroit.com/wp-content/uploads/2017/07/Michigan-We-Are-All-Migrants-Here_2017.pdf
- Institute for Social Policy and Understanding. (2018, April 30). *American Muslim Poll 2018: Full Report*. Diambil kembali dari <https://www.ispu.org/american-muslim-poll-2018-full-report/>
- Kertopati, L. (2017, Augustus 15). *Donald Trump dan Bangkitnya Supremasi Kulit Putih di AS*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170815143251-134-234889/donald-trump-dan-bangkitnya-supremasi-kulit-putih-di-as>
- Lamarque, K. (2017, February 1). *Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Bela Larangan Imigrasi Trump*. Diambil kembali dari [VOAIndonesia.com](https://www.voaindonesia.com):

- <https://www.voaindonesia.com/a/menteri-keamanan-dalam-negeri-as-bela-larangan-imigrasi-trump/3701263.html>
- Maxwell, C. (2019, January 31). *Trump's Shutdown Threatened the American Dream, Especially for People of Color*. Diambil kembali dari Center for American Progress: <https://www.americanprogress.org/issues/race/news/2019/01/31/465605/trumps-shutdown-threatened-american-dream-especially-people-color/>
- Mazrieva, E. (2017, January 31). *Ribuan Demonstrasi di Gedung Putih, Protes Larangan Trump*. Diambil kembali dari VOAIndonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-protes-larangan-trump-di-gedung-putih-/3697625.html>
- Mulana, V. (2018, July 11). *WNI Terkena Dampak Kebijakan Imigrasi Trump*. Diambil kembali dari Sindonews.com: <https://international.sindonews.com/read/1320847/40/wni-terkena-dampak-kebijakan-imigrasi-trump-1531302292>
- Patnistik, E. (2011, Mei 2). *Obama: Bin Laden Tewas di Pakistan*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/05/02/10445329/obama.bin.laden.tewas.di.pakistan>
- Permana, F. E. (2017, March 9). *Ancaman White Supremacy di Amerika*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/09/omje8q313-ancaman-white-supremacy-di-amerika>
- Pew Research Center. (2017, July 26). *U.Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American Dream*. Diambil kembali dari <https://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/>
- Pos Kota News. (2017, January 26). *Meksiko Tolak Danai Proyek Tembok Perbatasan AS-Meksiko*. Diambil kembali dari <http://poskotanews.com/2017/01/26/meksiko-tolak-danai-proyek-tembok-perbatasan-as-meksiko/>
- Purnama, C. L. (2017, March 2). *Meksiko Tegaskan akan Pertahankan Hak Migran*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/om73f1377/meksiko-tegaskan-akan-pertahankan-hak-migran>
- Saputri, M. (2017, February 1). *Empat Negara Bagian AS Menggugat Kebijakan Imigrasi Trump*. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/empat-negara-bagian-as-menggugat-kebijakan-imigrasi-trump-ch7E>
- Sofwan, R. (2017, October 3). *Menunggu Label Terorisme pada Insiden Las Vegas*. Diambil kembali dari cnnindonesia.com:

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171003143422-106-245823/menunggu-label-terorisme-pada-insiden-las-vegas>
- Suastha, R. D. (2016, December 11). *Trump Jadi Presiden, Laporan Rasisme di AS Meningkat*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161111161116-134-172067/trump-jadi-presiden-laporan-rasisme-di-as-meningkat>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- The American Dream US Greencard Service GmbH. (2019). *What is a Green Card?* Dipetik June 28, 2019, dari <https://www.green-card.com/en/>
- The Council on Foreign Relations. (2018). *U.S. Postwar Immigration Policy*. Diambil kembali dari <https://www.cfr.org/timeline/us-postwar-immigration-policy>
- Trump, D. J. (2017, January 27). *Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*. Diambil kembali dari White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states/>
- Trump, D. J. (2017, January 25). *Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements*. Diambil kembali dari White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/>
- Trump, D. J. (2017, January 25). *Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States*. Diambil kembali dari White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/>
- Trump, D. J. (2018, April 18). *President Trump Promotes "Buy American and Hire American"*. Diambil kembali dari White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-promotes-buy-american-hire-american/>
- U.S Department Of Homeland Security. (2019, June 5). *Yearbook of Immigration Statistics 2017*. Diambil kembali dari <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2017>
- U.S. Citizenship and Immigration Services. (2018, February 14). *Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)*. Diambil kembali dari <https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca>
- U.S. Department of Homeland Security. (2020, April 23). *Yearbook of Immigration Statistics 2018*. Diambil kembali dari U.S. Department of Homeland Security: <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2018>

Winarno, B. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.